

REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER

Chairiyah

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
E-mail:Chairiyah@ustjogja.ac.id

Abstract: Pancasila as the Indonesian state should be the guideline for all Indonesian citizens in various spheres of life. But in fact this time the noble values of pancasila increasingly eroded due to the influence of westernization and globalization are less well filtered. Indication of the waning practice of pancasila values can be seen from the increasing number of cases involving young people which reflects the weak character of the nation, such as the rise of student brawls, clashes between students, anarchist demonstrations, cases immoral, crime, and so forth. To restore the values of pancasila in the life of society, nation and state need for revitalization efforts. Revitalization means process, ways, and actions to revive something that was previously lacking empowered. Through revitalization, expected values of pancasila became more terberdaya in Indonesian society. All parties can actively participate in efforts to revitalize pancasila values in all aspects of life. One of them is to instill the values of pancasila through teaching in schools in an effort to form a good character of the younger generation. The younger generation as a potential successor to the leadership of the Indonesian nation must maintain and practice the values of pancasila to people's lives and the country in the future for the better in the sense of the Indonesian nation has identity as a nation of character .

Keywords: character, pancasila, values.

Latar belakang penulisan artikel ini adalah adanya realita yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut masalah kebangsaan, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai pancasila, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa (Kemdiknas, 2010:8-9). Daoed Joesoef (dalam Sri Edi, 2014:83) mengatakan "jangan menyesal kalau Pancasila diambil negara tetangga". Seperti kita ketahui bersama, setiap tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya pancasila namun pada tanggal itu hanya sebagian orang yang meyakini akan "kesaktian"-nya, sebagian lagi mengeramatkan, dan sebagian lagi sekedar seremonial tanpa perenungan suci tanpa upacara bendera oleh publik ataupun kedinasan birokrasi.

Sampai detik ini, keadaan masyarakat di negara kita sangat memperhatikan terutama di bidang karakter. Dari segi hukum setiap hari disuguhkan berita-berita mengenai kasus-kasus baru dalam hal korupsi yang dilakukan mulai dari oknum

lembaga tinggi negara, oknum birokrat, kader partai, maupun pengusaha. Dunia pendidikan yang fungsi utamanya adalah membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual melainkan juga berkarakter baik mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan karena dianggap kurang serius dalam mendidik generasi muda. Hal tersebut diindikasikan dengan banyaknya masalah yang menyangkut kasus pelajar seperti: tawuran antarpelajar, kasus kriminal yang melibatkan pelajar, kasus asusila, aksi *vandalisme*, dan sebagainya.

Degradasi moral para generasi muda tersebut mendorong pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 mencanangkan program "Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa" sebagai gerakan nasional. Langkah tersebut dinilai tepat, sebab pada hakikatnya masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini bukan lagi soal intelektual melainkan moral. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II mengangkat isu tentang pendidikan karakter bangsa sebagai pilar pembangunan. Selanjutnya Presiden menyatakan bahwa:

“ kita harus menjaga jati diri kita, keindonesiaan kita. Hal yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain di dunia adalah budaya kita, *way of life* kita dan keindonesiaan kita. Ada identitas dan kepribadian yang membuat bangsa Indonesia khas, unggul, dan tidak mudah goyah. Keindonesiaan kita tercermin dalam sikap pluralisme atau kebhinekaan, kekeluargaan, kesatuan, toleransi, sikap moderat, keterbukaan, dan kemanusiaan. Hal-hal inilah yang harus kita jaga, kita pupuk, kita suburkan di hati sanubari kita dan di hati anak-anak kita”.

Pernyataan presiden tersebut mengingatkan kepada kita kepada pesan Ir. Soekarno, yang pernah mengatakan bahwa tugas berat untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa. Apabila pembangunan karakter bangsa ini tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli (H. Soemarno Soedarsono, 2009:1). Pernyataan tersebut menunjukkan akan pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter demi tegaknya jati diri bangsa supaya mampu bersaing di dunia global. Pandangan tersebut cukup untuk memberikan gambaran bahwa pendidikan karakter bangsa itu merupakan hal sangat mendasar dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika pendidikan dan pembangunan karakter bangsa ini secara konstitusional memiliki landasan yang kuat. Landasan utama yang mendasari serta komprehensif ialah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya secara operasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (UU RI No. 17 Tahun 2007), ditegaskan bahwa misi pertama pembangunan nasional adalah terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman dan bertakwa kepada tuhan YME, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi IPTEKS.

Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, mengatakan bahwa pendidikan karakter harus dimulai sejak dini yakni dari jenjang pendidikan sekolah dasar, karena pada jenjang ini porsinya mencapai 60 persen dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini agar lebih mudah diajarkan dan melekat di jiwa anak-anak itu hingga kelak ia dewasa. Selain itu, meningkatkan mutu siswa hanya dari segi kognitif saja maka hasilnya akan sia-sia, seperti yang diungkapkan oleh beberapa tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi (Zaim Elmubarok, 2008:3) yang mengatakan bahwa salah satu dosa fatal adalah “*educa-*

tion without character”. Oleh karena itu, betapa pentingnya para guru menanamkan pendidikan yang sarat dengan budi pekerti yang tinggi dengan menekankan tiga aspek, yakni kognisi, afeksi, dan psikomotor seimbang serta berkesinambungan.

PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Karakter

Lickona (1991:51) dalam bukunya *Educating for Character* menjelaskan tentang pengertian karakter dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut.

Character consist of operative values, values in action. Character conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling and moral behavior. Good character consists of knowing the good, desiring the good and doing the good-habits of the mind, habits of the heart and habits of action.

Pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa karakter terdiri atas nilai-nilai tindakan. Karakter dipahami mempunyai tiga komponen saling berhubungan yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan yang baik, menginginkan yang baik dan melakukan kebiasaan yang baik pula dari pikiran, kebiasaan, dan tindakan. Pendidikan karakter mengangkat nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh latar belakang agama, budaya dan tradisi yang berbeda, tidak sekedar mengangkat teori semata namun juga aplikasinya di masyarakat. Pendidikan karakter dimaksudkan sekaligus sebagai pembentukan karakter. Pendidikan karakter itu sendiri merupakan sebuah proses panjang, yaitu proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai luhur, budi pekerti, akhlak mulia yang berakar pada ajaran agama, adat istiadat, dan nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mengembangkan kepribadian peserta didik supaya menjadi manusia yang bermartabat, menjadi warga bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Dengan demikian, siswa membutuhkan pendidikan karakter yang akan membentuk karakter positif.

Pendidikan karakter penting dan mendesak untuk dilakukan pada saat ini karena hasil pendidikan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, apalagi melihat fenomena dikalangan remaja. Dekadensi moral yang semakin meningkat disebabkan pendidikan tidak menyentuh aspek afektif, sehingga perilaku siswa tidak mencerminkan manusia yang memiliki karakter baik, yang ada hanyalah siswa cerdas tetapi memiliki emosi tumpul. Untuk itulah guru perlu mendidik siswa agar memiliki karakter positif. Seperti yang diungkapkan oleh Lickona (1991:53), “*There are many different kinds of*

moral knowing we need to draw on as we deal with life's moral challenges. The following six stand out as desirable goals of character education". Menurut Lickona, memiliki pengetahuan nilai moral itu tidak cukup untuk menjadi manusia berkarakter, nilai moral harus disertai dengan adanya karakter bermoral. Selain itu, John Dewey (Douglas J. Simpson, et.al: 2005:182) mengungkapkan, *"The teacher loses the position of external boss or dictator but takes on that of leader of group activities"*. Maksud pernyataan Dewey tersebut ialah guru di dalam kelas tidak sebagai diktator yang menggunakan cara indoktrinasi dalam menyampaikan pengetahuan, namun guru adalah seorang pemimpin yang mengemban amanah moral dihadapan peserta didiknya.

Tujuan Pendidikan Karakter

Tujuan pendidikan karakter menurut Nurul Zuriyah (2008:64-65) yaitu memfasilitasi siswa agar mampu menggunakan pengetahuan; mengkaji, menginternalisasi, dan mempersonalisasikan nilai; serta mengembangkan keterampilan sosial dan akhlak mulia dalam diri siswa, sehingga dapat mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari dalam berbagai konteks sosial budaya yang berbhineka sepanjang hayat. Sekolah merupakan institusi yang memiliki tugas penting bukan hanya untuk meningkatkan penguasaan informasi dan teknologi dari anak didik, tetapi ia juga bertugas dalam pembentukan kapasitas bertanggungjawab siswa dan kapasitas pengambilan keputusan yang bijak dalam kehidupan, seperti diungkapkan oleh Horace Mann (Zaim Elmubarok, 2008:106) yang menyatakan, *"the highest and noblest office of education pertains to our moral nature. The common school should teach virtue before knowledge, for knowledge without virtue poses its own dangers"*. Inti dari pendapat tersebut bahwa sekolah haruslah menjadi penggerak utama dalam pendidikan yang bebas (*free public education*), pendidikan sebaiknya bersifat universal, tidak memihak (*non sectarian*), dan bebas. Untuk itulah kemudian disusun suatu model baru dalam pendidikan moral yang berujung pada pendidikan karakter agar permasalahan moral dapat diatasi.

Sjarkawi (2006:39) mengungkapkan bahwa pendidikan karakter bertujuan membina terbentuknya perilaku siswa yang baik bagi setiap orang. Artinya, pendidikan nilai karakter bukan sekedar rmemahami tentang aturan benar dan salah atau mengetahui tentang ketentuan baik dan buruk, tetapi harus benar-benar meningkatkan perilaku moral seseorang. Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan harus menggunakan perwujudan perilaku karakter sebagai ukurannya. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk memfasilita-

si siswa agar mampu menggunakan pengetahuan, mengkaji, menginternalisasi, mempersonalisasi nilai, dan mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya akhlak mulia dalam diri siswa serta mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari.

Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter

Menurut Darmodiharjo (Kurotul Aeni & Sudaryanto, 2005:27) nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Barth (1990:370) menjelaskan bahwa nilai adalah *"the results of judgments made by an individual or the society as a whole which determine the relative importance or worth of a thing, idea, practice or believe"*. Penjelasan tersebut mengandung pengertian bahwa nilai merupakan hasil pertimbangan yang dibuat oleh seseorang atau masyarakat secara kelompok untuk menentukan penting atau berharganya suatu hal, gagasan, atau praktek.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa nilai merupakan suatu esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Nilai adalah sesuatu yang abstrak dan ideal. Nilai bukan benda konkret, bukan fakta, tidak hanya sekedar soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, yang disenangi dan tidak disenangi. Nilai itu terletak diantara hubungan subjek penilai dengan objek. Nilai yang terletak di bawah keyakinan berada dalam dunia rohaniah/batiniah, spiritual, tidak berwujud, dan tidak empirik, tetapi sangat kuat pengaruh dan peranannya dalam setiap perbuatan dan penampilan seseorang. Nilai menjadi standar tingkah laku yang bersifat tetap dan abadi.

Terdapat berbagai macam nilai dalam pendidikan karakter. Lickona (2000:48) mengungkapkan, *"The content of good character is virtue. Virtues – such as honesty, justice, courage, and compassion – are dispositions to behave in a morally good way"*. Maksud dari pendapat Lickona tersebut ialah bahwa isi atau konten dari karakter yang baik adalah kebaikan seperti kejujuran, keadilan, keberanian, tenggang rasa, yang semuanya itu adalah tindakan baik yang bermoral.

Nilai-nilai luhur dalam ajaran Tamansiswa diantaranya ialah: kemerdekaan, makarya, kebangsaan, kultural/kebudayaan, kekeluargaan, demokratis, religius, dan kesucian. Sementara nilai-nilai pendidikan karakter yang dicanangkan oleh kementerian pendidikan nasional meliputi 18 nilai yakni: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial,

dan tanggung jawab. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang harus diajarkan meliputi nilai-nilai kehidupan, baik yang termasuk dalam nilai moralitas, nilai kebaikkan, nilai religius, dan nilai kewarganegaraan.

Pancasila sebagai Sumber Nilai

Pancasila merupakan ideologi, dasar negara, dan falsafah negara yang harus dipertahankan dan terus dihidupkan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi dewasa ini pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme generasi muda semakin menurun. Oleh karena itu, penting dilakukannya revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi elemen masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya.

Indonesia merupakan negara yang beragam, kehidupan masyarakatnya diwarnai oleh berbagai macam suku bangsa, adat-istiadat, hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang heterogen atau plural tersebut dibutuhkan ideologi yang universal, tetapi dapat mengayomi seluruh bangsa. Ideologi itulah yang disebut Pancasila. Bapak Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Ki Hadjar Dewantara pernah menegaskan: “...*Pengajaran harus bersifat kebangsaan, kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita ...*”.

Pancasila adalah dasar negara. Pancasila bukan wahana tetapi ruh yang harus tetap hidup karena tanpa Pancasila maka Indonesia tidak ada. Di atas Pancasila sebagai dasar negara itu, berdirilah pilar-pilar negara. Ada empat pilar yang ditegakkan di atas dasar negara yaitu: 1) Proklamasi Kemerdekaan (sebagai pesan eksistensial tertinggi), 2) UUD 1945, 3) NKRI, 4) Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa dasar maka pilar-pilar akan mengambang. Pancasila sebagai dasar memberi ruh dan warna pada pilar-pilar yang ditegakkan di atasnya (Sri Edi, 2014:29).

Pembangunan karakter bangsa sudah menjadi harga mati pada masa-masa sekarang ini. Perilaku-perilaku menyimpang yang telah membudaya hanya dapat diberantas secara tuntas dengan mengubah pola pikir dan karakter seseorang. Terkadang kita sulit untuk menentukan parameter yang sesuai terlebih-lebih dengan kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam etnis, agama, budaya, dan sebagainya. Di sinilah kita semestinya kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Pada hakikatnya pendidikan Pancasila adalah upaya sadar diri suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku

warga masyarakat, bangsa dan negara secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasionalnya. Berdasarkan UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 2 menyatakan bahwa “pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”, dapat diartikan bahwa kurikulum pendidikan nasional seharusnya adalah untuk memperkokoh sikap cinta tanah air atau nasionalisme, dengan kata lain kurikulum pendidikan nasional seharusnya membudayakan *mindset* ketunggalikaan di tengah realita kemajemukan atau kebhinekaan Indonesia.

Pancasila secara alami lahir dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Keberagaman di Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, warna kulit, kebiasaan budaya yang berbeda satu sama lain dapat dipersatukan dengan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap butir sila Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa yang sudah melekat pada tiap sanubari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila memiliki lima buah sila yang memiliki makna yang mendalam sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Nilai-nilai dalam Pancasila

Di dalam *Dictionary of sociology*, nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada sesuatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Sebagai suatu dasar filsafat negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan, meskipun antara sila yang satu dengan sila yang berbeda, tetapi kesemuanya merupakan kesatuan yang sistematis. Berikut penjelasan sila-sila dalam Pancasila.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai penjawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan

HAM harus dijiwai nilai-nilai keTuhan Yang maha Esa.

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam perauran perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudi bermoral dan beragama. Dalam kehidupan bernegara harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan antara lain dalam kehidupan pemerintahan negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan kemanan serta dalam kehidupan keagamaan.
3. Sila Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan dengan sila keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan dijiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa, suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok, golongan. Oleh karena itu, perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tapi satu, mengikatkan diri dalam persatuan yang dilukiskan dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan

pada suatu sintesa yang saling menuntungkan yakni persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indoensia, dan mendasari serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari dan oleh rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara, maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila kerakyatan di antaranya adalah: a) adanya kebebasan yang disertai dengan tanggungjawab terhadap masyarakat bangsa maupun moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, b) menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, dan c) menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indoensia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan, yaitu bangsa yang memiliki komitmen dan sikap untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter berkeadilan sosial seseorang tercermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; sikap adil; menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban; hormat terhadap hak-hak orang lain

Sebagai suatu sistem nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki keunikan atau kekhasan, karena nilai-nilai Pancasila mempunyai

kedudukan atau status yang tetap dan berangkai. Keunikan ini disebabkan, karena masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Kekhususan ini merupakan identitas bagi bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai nilai-nilai universal, pada bangsa lain tidak dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana bangsa Indonesia dan bangsa lain. Dengan demikian perbedaannya bukan terletak pada sikap ramah tamah, gotong royong dan lain-lain, tetapi tetap terletak pada pengamalan atau penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia oleh karena itu penerapannya harus ditumbuhkan dan dikembangkan tanpa adanya pemaksaan atau indoktrinasi melainkan harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani.

Berdasarkan uraian di atas, Pancasila memiliki nilai-nilai yang apabila diamalkan, maka dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Secara teoritis, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang merupakan gabungan dari nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai instrumental Pancasila tercermin dalam UUD 1945 maupun hukum perundang-undangan lainnya. Nilai praksis tercermin dalam sikap warga negara Indonesia mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu memang bersifat abstrak, umum, dan relatif tidak berubah, namun maknanya selalu bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Upaya Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Penguatan Karakter Bangsa

Franz Magnis-Suseno (2012:11) menyatakan bahwa kita mempunyai etika nasional yang dirumuskan dalam Pancasila. Etika dalam Pancasila bukan hanya sebuah rumusan melainkan merupakan prasyarat agar bangsa Indonesia bisa maju bersama, damai, sejahtera dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Franz Magnis-Suseno merumuskan etika Pancasila dalam lima pedoman yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Kelima pedoman tersebut adalah: 1) tak boleh ada tekanan, ancaman atau paksaan dalam hal agama, 2) dalam situasi apa pun kita bertindak secara beradab, 3) kita maju dan kita maju bersama 4) mari kita sukseskan demokrasi kita, dan 5) mari kita dahulukan yang miskin dan lemah agar dapat hidup secara manusiawi. Kelima pedoman tersebut muncul sebagai reaksi atas kondisi perilaku masyarakat yang sangat mengkhawatirkan seperti saat ini. Pancasila sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia di era globalisasi ini semakin diabaikan bahkan ditinggalkan. Oleh karena itu, perlu upaya untuk merevitalisasi atau membangun kembali karakter bangsa yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Kita ketahui bahwa manusia mustahil dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kasus tersebut menimbulkan suatu kesadaran bahwa segala yang akan dicapai pada dasarnya membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya hal tersebut juga melahirkan kesadaran bahwa setiap manusia terdorong hatinya untuk melakukan hal yang baik bagi orang lain dan lingkungannya. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam corak dan budayanya ini, kemampuan untuk mengendalikan diri dan kepentingan adalah suatu sikap yang mempunyai arti sangat penting dan bahkan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan menumbuhkan keseimbangan masyarakat. Dalam pandangan Pancasila, hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang antara individu dengan masyarakatnya tidak netral, melainkan dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai kesatuan. Manusia harus hidup dan bekerja sama dengan manusia lain dalam bermasyarakat (Kaelan, 2010:31).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan Pancasila merupakan satu aspek penting untuk membangun karakter generasi bangsa. Hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang bermutu yang merupakan produk pendidikan dan merupakan kunci keberhasilan suatu negara. Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menyatakan: "Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Pernyataan-pernyataan di atas tampak jelas bahwa pendidikan harus mampu membentuk atau menciptakan manusia yang dapat mengikuti dan melibatkan diri dalam proses perkembangan, karena pembangunan merupakan proses perkembangan, yaitu suatu proses perubahan yang meningkat dan dinamis. Hal ini berarti bahwa membangun hanya dapat dilaksanakan oleh manusia-manusia yang berjiwa pembangunan, yaitu manusia yang dapat menunjang pembangunan bangsa dalam arti luas, baik material, spiritual serta sosial budaya.

Upaya untuk merevitalisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat perlu dilakukan untuk meminimalkan agar tingkat degradasi moral dapat menurun. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, di antaranya sebagai berikut.

1. Peningkatan Perhatian Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Pancasila. Dalam mengha-

lau dampak negatif berkembangnya berbagai ideologi negara lain termasuk kuatnya pengaruh ideologi leluhur ditengah-tengah masyarakat, maka perhatian masyarakat terhadap nilai-nilai pancasila harus kembali dapat ditingkatkan melalui serangkaian upaya dan kegiatan sebagai berikut.

- a. Mengunggah dan mensosialisasikan secara terus menerus eksistensi dan keberadaan ideologi pancasila sebagai pemersatu untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme dikalangan pemimpin politik, pengusaha, pemuda dan tokoh-tokoh agama.
 - b. Meningkatkan filter/saringan masyarakat terhadap eksistensi ideologi kapitalis dan liberalis yang mencoba untuk memecah belah Indonesia disemua aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.
 - c. Meningkatkan intensitas pemberian materi pelajaran pendidikan Pendidikan pancasila seperti pendidikan moral pancasila pada tataran teori maupun praktik kepada para siswa/mahasiswa pada semua jenjang pendidikan. Pengemasan materi pelajaran tersebut harus ditampilkan semenarik mungkin dan menghindari kesan adanya doktrinasi sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 27-29 Mei 2011 dengan 12.056 responden lewat mewawancarai/tatap muka kepada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pengusaha, tokoh masyarakat, TNI, Polri, dan lainnya yang di 181 kabupaten/kota di 33 provinsi. Pada survei itu diajukan pertanyaan "Bagaimana cara yang tepat untuk memahami Pancasila?" Hasilnya, 30 persen melalui pendidikan, 19 persen melalui teladan dari pejabat negara dan pemerintah, 14 persen melalui teladan dari tokoh masyarakat, 12 persen melalui media massa, dan 10 persen melalui ceramah keagamaan. Ketika ditanya siapa yang paling tepat melakukan edukasi dan sosialisasi pancasila, 43 persen responden menyatakan para guru dan dosen, 28 persen tokoh masyarakat dan pemuka agama, 20 persen badan khusus pemerintah seperti BP 7, dan 3 persen responden memilih elite politik.
2. Penyamaan Interpretasi Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila. Kenyataan saat ini, interpretasi masyarakat terhadap nilai-nilai pancasila seringkali terdapat perbedaan kerap menimbulkan adanya kesalahan dalam penafsiran penjabaran dari suatu sila, sehingga timbul benturan antarmasyarakat yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, guna menghindari hal tersebut, maka diperlukan adanya penyamaan interpretasi pemahaman nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut.
 - a. Sosialisasi nilai-nilai pancasila dengan memanfaatkan tokoh masyarakat. Upaya sosialisasi ini dapat dilakukan oleh jajaran pemerintah setempat, anggota DPRD, serta aparat TNI atau Polri.
 - b. Pengkajian terhadap kondisi penghayatan nilai-nilai pancasila. Upaya ini dapat dilakukan oleh jajaran pemerintahan setempat dengan melibatkan kalangan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengkajian dilakukan terhadap nilai-nilai pancasila beserta relevansinya terhadap berbagai perkembangan yang terjadi.
 - c. Pemerintah melalui Kemendagri dan Kemendiknas merumuskan kebijaksanaan dan program penyusunan buku pedoman/arahan umum implementasi nilai-nilai pancasila dan menjadikan buku tersebut sebagai bahan bacaan wajib bagi seluruh aparatur penyelenggara negara di berbagai instansi pemerintah, kalangan swasta maupun dunia pendidikan.
 - d. Pemerintah melalui Kemendiknas menyusun seperangkat kebijakan dan program penataan kurikulum pendidikan materi pancasila dengan mengacu pada buku pedoman/arahan umum implementasi nilai-nilai pancasila, sehingga ada kesamaan dan kesinambungan dalam interpretasi nilai-nilai pancasila dari pusat sampai ke daerah.
 3. Penataan Kelembagaan Formal Terstruktur Sebagai Pengawas Dan Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila Secara Formal. Kelembagaan formal terstruktur yang diterapkan secara terstruktur/melembaga, maupun melalui sistem pendidikan nasional yang menyangkut program membudayakan dan memasyarakatkan pancasila di berbagai lingkungan organisasi kemasyarakatan maupun lingkungan pendidikan dapat terbentuk, sehingga dapat terwujud lembaga yang mengawasi, mengembangkan Pancasila secara formal. Untuk itu diperlukan adanya berbagai upaya sebagai berikut.
 - a. Pemerintah/Pemda bekerjasama dengan kalangan akademisi merumuskan kebijakan pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Nilai-nilai.
 - b. Pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang

diberikan kepada Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila, agar lembaga ini memiliki dasar, pedoman dan payung hukum memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya

- c. Pemerintah/Pemda meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dalam merumuskan berbagai aturan mengenai mekanisme kerja Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- d. Pemerintah/Pemda melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh mengenai keberadaan Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila.

Pendidikan merupakan cara yang ampuh untuk menanamkan nilai-nilai pancasila yang kini terindikasi sudah mulai dilupakan. Apalagi di era globalisasi sekarang ini pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah mulai terkikis. Oleh sebab itu, untuk membangkitkan semangat nilai-nilai yang ada dalam pancasila diperlukan pengaplikasian sejak dini. Untuk itu, pendidikan karakter yang akan diaplikasikan pemerintah sangat diperlukan agar pancasila tidak hanya jadi sekedar omongan, tetapi juga diaplikasikan. Sebaiknya pengamalan nilai-nilai pancasila harus selalu di pegang teguh oleh peserta didik dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Salah satu benteng yang paling ampuh adalah dengan memahami nilai-nilai pancasila, sehingga dapat diaplikasikan. Peranan guru juga sangat dibutuhkan dalam membimbing anak didik. Selain itu, pancasila diajarkan pengamalannya di rumah oleh orang tua, karena pendidikan bukan sepenuhnya tanggung jawab sekolah. Pengamalan nilai-nilai pancasila terutama sila pertama

harus diajarkan mulai dari tingkat keluarga, karena siswa menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah bersama keluarga.

PENUTUP

Pembentukan karakter tidak semudah memberi nasihat dan instruksi, tetapi memerlukan kesabaran, pembiasaan, dan pengulangan. Proses pendidikan karakter merupakan keseluruhan proses pendidikan yang dialami peserta didik sebagai pengalaman pembentukan kepribadian melalui memahami dan mengalami sendiri nilai-nilai, keutamaan-keutamaan moral, nilai-nilai ideal agama, dan nilai-nilai moral. Pendidikan karakter di sekolah tidak dapat berjalan tanpa pemahaman yang cukup dan konsisten oleh seluruh stakeholder sekolah. Di sekolah, kepala sekolah, guru, dan karyawan harus memiliki persamaan persepsi tentang pendidikan karakter bagi peserta didik. Setiap personalia pendidikan memiliki peranan masing-masing. Pemaknaan kembali dan menghidupkan kembali nilai-nilai pancasila merupakan jalan yang tepat untuk melawan pengaruh negatif globalisasi yang berdampak buruk atau negatif bagi generasi muda. Untuk itulah diperlukan upaya dan usaha dalam menanamkan serta menginternalisasikan nilai-nilai pancasila, salah satunya melalui pendidikan pancasila lewat generasi muda penerus bangsa. Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter pribadi penerus bangsa yang tidak mudah goyah oleh derasnya arus globalisasi. Selain itu, perlu adanya aktualisasi nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ideologi pancasila. Dengan revitalisasi nilai-nilai pancasila diharapkan integritas nasional akan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Barth, J.L. 1990. *Methods of Instruction in Social Studies Education: Third Edition*. New York: University Press of America.
- Douglas J. Simpson, et.al. 2005. *John Dewey and The Art of Teaching*. California: Sage
- Franz Magnis-Suseno. 2012. "Etika Bangsa Berbudaya di Abad ke 21: Keharusan kalau Indonesia mau maju", makalah pada Seminar Nasional Membangun Karakter Bangsa melalui Pemantapan Kebudayaan Nasional dan Kesadaran Historis, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang 30 Mei 2012.
- Kaelan. 2010, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Offset
- Kemdiknas. 2010. *Buku Induk Pembangunan Karakter*: Jakarta: Kemendiknas
- Kurotul Aeni & Sudaryanto. *Proses pendidikan budi pekerti di Taman Muda Majelis Ibu Pawaiyatan Tamansiswa Yogyakarta*. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi* Nomor 1, Tahun VII, 2005.
- Lickona, T. 1991. *Educating for character*. New York: A Bantam Books.
- _____. 2000. *What is a good character? and how we develop it in our children? reclaiming children and youth*. *Bloomington: Vol 9, Iss. 4; p. 239 (13 page)*. <http://proquest.umi.com/pqdweb>, diambil pada tanggal 10 September 2010.

- Nurul Zuriah. 2007. *Pendidikan moral dan budi pekerti dalam perspektif perubahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemarno Soedarsono H. 2009. *Karakter Mengantarkan Bangsa dari Gelap Menuju Terang*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sjarkawi. 2008. *Pembentukan Kepribadian Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Edi Swasono. 2014. *Kedaulatan Kebangsaan Kerakyatan Mengisi Kemerdekaan*. Yogyakarta: UST Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- Zaim Elmubarok. 2008. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.